

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini berkembang dan majunya era reformasi membuat tata kelola pemerintah yang baik dan sesuai dengan aturan dalam kebijakan pemerintah daerah maupun pusat sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat banyak khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pusat. Dengan tercipta serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dalam pengelolaan keuangan lembaga pemerintah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Pada saat ini akuntansi menemui perkembangan yang sangat pesat, saat ini akuntansi hampir digunakan pada setiap sektor keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangan yang lebih efisien, praktis dan positif, salah satunya termasuk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang baik dan terus berkembang adalah harapan bagi seluruh masyarakat. Kinerja dan praktik pemerintah yang baik, positif dan bertanggungjawab akan selalu didukung oleh masyarakatnya. Keyakinan publik terhadap lembaga pemerintah yang baik dan yang telah diorganisir serta sudah direncanakan dan diimplementasikan secara terprogram yang berfokus pada kemajuan pemerintahan dan ditujukan pada seluruh rakyat akan sangat mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang besar. Sehingga akan memberikan keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.

Pemerintahan ialah organisasi yang berfungsi dalam melayani masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu hal yang dianggap penting adalah keikutsertaan dalam membentuk pemerintahan yang baik dan berkembang. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat secara luas dan dapat menghasilkan hasil yang berkualitas.

Selain dibuktikan dengan tindakan langsung dilapangan terhadap masyarakat, pemerintah juga bisa menunjukkan kinerjanya melalui laporan keuangan yang bisa dilihat oleh masyarakat secara luas. Laporan keuangan pemerintah sendiri telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Lembaga pemerintah yang berkomitmen untuk beroperasi dalam sektor pelayanan publik untuk masyarakat harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kinerjanya serta harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap publik. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal sangat penting yang berfokus pada kemampuan lembaga sektor publik untuk memberi tanggapan kepada pemangku kepentingan dengan organisasi tersebut.

Akuntabilitas sektor publik memiliki peranan yang begitu penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Lebih khusus lagi,

akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah, agent, kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut.

Hasil dari laporan keuangan yang berdasar pada standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk menjawab kebutuhan informasi keuangan kualitas tinggi bagi pemakai laporan keuangan serta agar dapat dilihat oleh masyarakat secara mudah dan untuk mengevaluasi akuntabilitas serta untuk mewujudkan putusan ekonomi, sosial dan politik. Dengan adanya laporan keuangan yang sudah sesuai maka akan memudahkan bagi banyak orang untuk mengawasi jalannya kinerja lembaga pemerintahan yang terkait.

Besarnya tuntutan masyarakat untuk penegakan pertanggung jawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat melalui berbagai instansi pemerintah, membuat lembaga pemerintah terkait harus benar-benar mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam instansi tersebut baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini sebagai lembaga adapun berkomitmen untuk beroperasi disektor jasa pelayanan rakyat, pemerintah harus melaksanakan keterbukaan dan pertanggung jawaban kepada publik agar masyarakat dapat percaya dan yakin terhadap lembaga pemerintahan yang terkait.

Semakin bagus dan baik lembaga pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur, maka semakin meningkatkan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Realisasi dari aksesibilitas yaitu kemudahan bagi publik dalam mengakses laporan keuangan maka akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun pusat. Meskipun demikian, masih terdapat lembaga pemerintah yang belum maksimal dalam mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan baik melalui media sosial, media massa atau dengan cara lainnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta selama 6 (enam) tahun terakhir ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) dari BPK RI. Walaupun Pemerintah Provinsi Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, namun BPK masih menemukan kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPK menemukan pemborosan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jakarta Tahun Anggaran pada tahun 2020 mulai dari anggaran belanja Rp1,1 miliar untuk pengadaan Rapid test c.ovid-19 pada 2020 lalu, hingga kelebihan bayar gaji PNS. Hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memperbaikinya.



Gambar 1. 1 Grafik Hasilpin Piemierintah Priovinsi Jakarta tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (bpk.go.id)

Dari grafik di atas selama 6 (enam) tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Jakarta mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Jakarta dikatakan berkualitas dan

terus melakukan perbaikan dari tahun ketahun. Adapun upaya pemerintah Provinsi Jakarta yang dilakukan untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga terus menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, penetapan peraturan dan pembenahan tata kelola keuangan daerah, pelaksanaan reviu Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based review*), penguatan sistem pengendalian internal melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat dan melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jakarta selaku lembaga pemerintah yang harus membuat laporan keuangan dan diperiksa oleh BPK sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sudah diaudit dan diberi opini oleh BPK sudah melakukan tugasnya dengan baik dan kinerja serta akuntabilitasnya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Jakarta sendiri kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Raihan Opini WTP tersebut merupakan capaian untuk yang keenam kalinya sejak Tahun 2017. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti kualitas laporan keuangannya Pemerintah Provinsi Jakarta sudah bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan untuk kedepannya, karena jika tidak dipertahankan dan terus diperbaiki kinerjanya bukan tidak mungkin opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun mendatang tidak bisa di peroleh lagi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertahun 2021 meminta kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan meski telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jakarta kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Masih ada beberapa temuan yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jakarta seperti terdapat kelebihan pembayaran atas belanja dan denda keterlambatan senilai Rp45,87 miliar. Kelebihan pembayaran atas belanja senilai Rp11,34 miliar terjadi karena adanya kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,9 miliar, kekurangan volume pengadaan barang dan jasa senilai Rp5,06 miliar, kelebihan belanja hibah dan Bansos senilai Rp8,78 juta. Sedangkan denda keterlambatan adalah senilai atas Rp34,53 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14,66 miliar. Penatausahaan penyerahan dan pencatatan aset tetap Fasos dan Fasum belum tertib. Ketidaktertiban tersebut antara lain adalah dua bidang tanah Fasos dan Fasum yang telah diterima dari pemegang Surat Izin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) Rp17,72 miliar berstatus sengketa, penerimaan aset Fasos dan Fasum belum seluruhnya dilaporkan oleh Wali Kota ke BPAD. Dan Bantuan sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan ini diindikasikan bermasalah pada aspek andal (*reliability*). Kawatu (2019) menyebutkan bahwa andal (*reliability*) adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:

- Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
- Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
- Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Akuntan bagian publik dalam hal ini berperan penting karena sebagai pemberi layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan

transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. BPK selaku lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan juga harus di pertanggungjawabkan hasilnya melalui laporan keuangan yang menjadi bagian akhir dari proses pengauditan yang dilakukan BPK. Opini yang di keluarkan oleh BPK sangat di perlukan sebagai tolak ukur baik atau tidaknya suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kinerjanya sudah sebaik apa.

Oleh sebab itu kualitas auditor Inspektorat Jenderal, akuntabilitas dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerjanya terhadap masyarakat. Semakin meningkat akuntabilitas maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan. Sedangkan kualitas auditor Inspektorat Jenderal didalam sektor publik sangat diperlukan dengan tujuan agar hasil akhirnya yaitu laporan keuangan yang baik dari instansi tersebut dapat dengan mudah dicapai karena kualitas auditor Inspektorat Jenderal sudah memenuhi kriteria, sehingga opini yang diberikan BPK akan bagus hasil akhirnya dan dengan adanya bantuan pengawasan dari masyarakat bisa lebih meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun penyalahgunaan dana pada lembaga pemerintah yang terkait. Pelaporan keuangan pada sektor publik merupakan sebuah elemen kunci dalam membuat akuntabilitas sektor publik. Dalam suatu akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan didalam suatu sektor publik tersebut kepada eksekutif, kepada legislatif, dan yudikatif serta selain itu juga kepada masyarakat umum.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Apabila informasi yang ada pada laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan

pemerintah tersebut dapat dikatakan berkualitas. Indikator laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Walaupun masih ada beberapa catatan didalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta, hal tersebut tidak merubah hasil opini audit sehingga Pemerintah Provinsi Jakarta tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih masuk dalam indikator andal (*reliability*), hal tersebut dikarenakan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan dan nilai temuannya masih dibawah batas material dari jumlah kewajiban dan aset Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dalam hasil penelitian Julia (2017) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SKPD), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi, standar pelaporan, pengendalian teknologi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat, peneliti memilih variabel penelitian kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SKPD), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi, standar pelaporan, pengendalian teknologi dan sistem pengendalian intern karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika penerapan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SKPD), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi, standar pelaporan, pengendalian teknologi dan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik.

Selanjutnya dalam hasil penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu terdapat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, pengendalian intern, pengawasan akuntansi sektor publik dan pencapaian sasaran

terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat, peneliti memilih variabel penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, pengendalian intern, pengawasan akuntansi sektor publik dan pencapaian sasaran intern karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, pengendalian intern, pengawasan akuntansi sektor publik dan pencapaian sasaran intern sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik.

Sedangkan dalam hasil penelitian Efendi, Darwanis dan Syukriy (2017) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat kabupaten Aceh Tengah yaitu terdapat partisipasi masyarakat, pengawasan akuntansi sektor publik, pencapaian sasaran, penerapan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat, peneliti memilih variabel penelitian partisipasi masyarakat, pengawasan akuntansi sektor publik, pencapaian sasaran, penerapan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika penerapan partisipasi masyarakat, pengawasan akuntansi sektor publik, pencapaian sasaran, penerapan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik. Lalu akan semakin bagus jika menambahkan faktor lain yang belum diuji yaitu kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas dan pengawasan agar dapat melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta, apakah sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku yaitu standar akuntansi sektor publik.

Terdapat kesenjangan dari penelitian berdasarkan hasil penelitian Hanafiah, Binawati dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian dari Adiwiraya (2015) menyatakan bahwa

akuntabilitas juga menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sumber daya manusia dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian dari Astuti (2017) menyatakan bahwa berdasarkan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Fungsi pemeriksaan Intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Grobogan) menunjukkan bahwa pengawasan intern dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan karyawan akan tetap mencari celah dari penerapan sistem pengendalian internal untuk kepentingan pribadi. Sehingga membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketidakkonsistenan penelitian-penelitian terdahulu memunculkan adanya *research gap*, hal ini yang memotivasi peneliti untuk lebih jauh memahami secara mendalam mengenai variabel dependen dan independen yang berkaitan. Dengan melihat adanya permasalahan, fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi latar belakang diajukannya penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memilih 3 variabel independen yaitu auditor inspektorat jenderal, akuntabilitas dan pengawasan.

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Riwahyuni, Said & Mustari (2021) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut dan Sapartiningsih, Suharno & Kristianto (2018) menyatakan bahwa secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan keuangan daerah berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan

karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan suatu pengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan suatu daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik pula. Pengawasan yang baik berupa kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan KKN dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi. Sehingga sangat penting sebuah pengawasan dilakukan dalam suatu instansi pemerintah baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar semua berjalan sesuai aturan dan lebih meminimalisir terjadinya sebuah penyelewengan.

Akuntabilitas sendiri berkaitan dengan sebuah tanggung jawab yang dilakukan suatu instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga menghasilkan hasil akhir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi *stakeholder* (pemangku kepentingan). Mardiasmo juga menyebutkan akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan Afifah dan Faturrahman (2021) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas publik menjadikan pemerintah daerah harus melakukan pelaporan secara horisontal (*horizontal reporting*) yang ditujukan kepada DPRD dan masyarakat secara akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Artinya, tidak sekedar melakukan pelaporan vertikal kepada pemerintah pusat (*vertical reporting*). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku (subjek) pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu daerah merupakan suatu bagian terpenting dalam mengukur sebuah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik ataupun buruknya kinerja suatu pemerintah. Menunjukkan semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan suatu instansi pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka akan semakin baik pula tingkah pencapaian pemerintahnya.

Akuntabilitas harus meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk dapat menilai tanggungjawab pemerintah atas seluruh aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas sendiri menekankan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah ialah sebuah laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintah berupa laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga akuntabilitas dalam sebuah instansi pemerintah sangat diperlukan agar nantinya apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa di pertanggungjawabkan kinerjanya melalui kualitas laporan keuangan kepada seluruh masyarakat dan dapat meminimalisir terjadinya sebuah kecurangan.

Kemajuan suatu instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus didukung dengan kualitas laporannya. Laporan keuangan yang berkualitas didapatkan melalui beberapa tahapan hingga pengawasan internal yang dalam hal ini dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal Provinsi Jakarta. Karena pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal Provinsi Jakarta memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang nantinya akan dihasilkan. Menurut Mulia (2018) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Sehingga untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik peran pengawasan internal dalam pemerintahan sangat diperlukan. Menurut Mubarak dkk (2021) menyatakan bahwa pengawasan internal dalam pemerintahan sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang nantinya akan di hasilkan.

Dalam menjalankan tugasnya aparatur negara harus didukung dengan keahlian yang sesuai dengan bidang yang di kerjakannya, hal tersebut bertujuan agar aparatur tersebut lebih kompeten dibidangnya karena sudah memiliki kemampuan dasar yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidak pemeliharaan kekayaan daerah serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh unit dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktiknya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Dalam Negeri RI nomor 107 tahun 2017. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Peran dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing wilayah Inspektorat. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jakarta hanya sebatas

pemberian saran kepada kepala daerah terhadap satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa. Sedangkan untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah. Bagi seorang auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit, baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan

Dari fenomena yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Jakarta menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut karena ada catatan dari BPK RI yang masih harus terus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta agar terus melakukan penyempurnaan, walaupun memang tidak membuat opini BPK RI berubah, tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan permasalahan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kualitas Auditor Itjen, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kualitas auditor Inspektorat Jenderal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta?
2. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta?
3. Apakah pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang sudah diuraikan di atas, dengan itu tujuan dari penelitian yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas auditor Inspektorat Jenderal dalam kualitas kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dalam pelaksanaan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pada kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah saran dan informasi bagi Pemerintah Provinsi Jakarta, Inspektorat Jendral Provinsi Jakarta dan orang yang tertarik dalam pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas auditor Inspektorat Jenderal, akuntabilitas dan pengawasan. Juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.